

**HUBUNGAN HUKUM BALAI LELANG SWASTA DI KANTOR  
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL )  
SURABAYA**

**( Studi Kasus Balai Lelang Star Surabaya )**

**Endang Lestari, S.H.  
NRP.124216021**

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan balai lelang swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya juga untuk mengetahui dan menganalisis payung hukum balai lelang swasta dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Balai Lelang Swasta.

Dari hasil penelitian diketahui : Pertama, Balai Lelang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan lelang noneksekusi sukarela dan melakukan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan jasa pra lelang dan jasa pasca lelang untuk semua jenis lelang. Hubungan hukum Balai Lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan perjanjian dengan bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan. Kedua, landasan hukum pengaturan mengenai balai lelang di Indonesia hingga sekarang masih diatur oleh peraturan setingkat peraturan menteri. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan menteri bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun peraturan menteri mengenai balai lelang tersebut dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, yaitu menteri keuangan yang membidangi urusan lelang sehingga peraturan menteri itu tetap berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : balai lelang, kewenangan, jenis lelang

**Abstract**

The purpose of this research is to know and analyze the position of private auction hall in Office of State Asset and Auction Service of Surabaya also to know and analyze legal umbrella of private auction hall in execution auction execution of right of responsibility through private auction hall.

From the research results are known: Firstly, the Auction Hall is authorized to hold voluntary non-execution auctions and conduct business activities including pre-auction services and post-auction services for all types of auctions. Legal relationship of Auction Hall in execution of auction of mortgage execution based on agreement with bank as creditor holder of mortgage. Secondly, the legal basis for the regulation on auction halls in Indonesia is still regulated by ministerial regulations. In the hierarchy of legislation, the ministerial regulation is not a legislation, but the ministerial regulation concerning the auction hall is established on the basis of the authority in certain government affairs affairs of the minister, namely the minister of finance in charge of the auction so that the minister's regulation is still qualified as a rule of law.

Keywords : auctin hall, authorized, type of auction